

Algoritma sebagai Subjek Etis: Analisis Filsafat Komunikasi terhadap Moralitas Sistem Kecerdasan Buatan

Gabriel Abdi Susanto

abdisusanto@yahoo.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta

Abstrak

Algoritma dalam sistem kecerdasan buatan (AI) semakin berperan dalam membentuk lanskap komunikasi digital. Namun, kajian filsafat komunikasi sering kali hanya menempatkan algoritma sebagai alat teknis, bukan sebagai subjek etis. Artikel ini menelaah bagaimana algoritma, khususnya dalam media sosial, berperan dalam membentuk opini publik, mendorong polarisasi sosial, dan memiliki implikasi etis. Dengan pendekatan filsafat komunikasi, artikel ini menyoroti aspek moralitas algoritma serta tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem AI yang lebih bertanggung jawab secara etis.

Keywords: Algoritma, Etika, Filsafat Komunikasi, Kecerdasan Buatan, Polarisasi Sosial

Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, algoritma memainkan peran yang semakin signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam komunikasi digital dan interaksi sosial. Algoritma tidak lagi sekadar perangkat teknis yang bertugas mengolah data, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dengan semakin kompleksnya sistem kecerdasan buatan (AI) yang mengandalkan algoritma dalam pengambilan keputusan, muncul pertanyaan mengenai aspek etika yang terkandung dalam penggunaannya. Apakah algoritma benar-benar netral, ataukah memiliki bias yang dapat mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam konteks filsafat komunikasi, yang mengkaji bagaimana algoritma sebagai sistem komunikasi berperan dalam membentuk opini publik, membangun wacana, serta menentukan informasi yang dapat diakses oleh pengguna.

Algoritma telah menjadi tulang punggung berbagai platform digital, terutama media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan menggunakan teknik personalisasi, algoritma menyaring dan menyajikan informasi yang dianggap relevan bagi setiap pengguna berdasarkan preferensi dan pola interaksi mereka. Namun, personalisasi ini memiliki konsekuensi yang tidak selalu positif. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah terbentuknya fenomena "filter bubble" dan "echo chamber," di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang serupa dengan mereka, sehingga mengurangi keberagaman perspektif. Hal ini dapat memperkuat polarisasi sosial dan politik, karena individu semakin jarang terpapar pada sudut pandang yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Pariser (2011) dalam bukunya *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, algoritma yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dapat secara tidak langsung menciptakan segregasi informasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain memperkuat polarisasi, algoritma juga memiliki potensi untuk menyebarkan disinformasi. Dalam banyak kasus, sistem algoritmik yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna lebih cenderung mempromosikan konten yang bersifat sensasional dan emosional dibandingkan konten yang berbasis fakta. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) dalam jurnal *Science* menemukan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan berita yang berbasis fakta di platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma, secara tidak langsung, dapat memperkuat penyebaran informasi yang menyesatkan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada persepsi dan keputusan publik.

Lebih jauh lagi, persoalan bias dalam algoritma juga menjadi perhatian utama dalam kajian filsafat komunikasi dan etika media. Algoritma dikembangkan oleh manusia yang memiliki nilai, kepentingan, dan perspektif tertentu. Bias ini dapat tertanam dalam desain dan implementasi algoritma, yang kemudian tercermin dalam keputusan yang dibuat oleh sistem kecerdasan buatan. Sebagai contoh, berbagai studi telah menemukan bahwa algoritma pengenalan wajah cenderung lebih akurat dalam mengidentifikasi individu dengan warna kulit terang dibandingkan dengan mereka yang berkulit gelap (Buolamwini & Gebru, 2018). Dalam konteks komunikasi digital, bias semacam ini dapat berdampak pada bagaimana individu dari kelompok sosial tertentu diperlakukan dalam ruang digital, yang pada gilirannya memengaruhi akses mereka terhadap informasi dan peluang sosial.

Implikasi etis dari algoritma juga mencakup aspek privasi. Dengan meningkatnya penggunaan big data dan kecerdasan buatan, algoritma memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memprediksi perilaku individu dengan tingkat akurasi yang mengkhawatirkan. Dalam banyak kasus, pengguna tidak sepenuhnya menyadari sejauh mana data mereka dikumpulkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018, di mana data pribadi jutaan pengguna Facebook digunakan untuk memanipulasi opini politik, menunjukkan bagaimana algoritma dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa transparansi yang memadai (Isaak & Hanna, 2018). Kasus ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana etika dalam penggunaan algoritma harus diperhatikan dan bagaimana regulasi yang tepat dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak individu.

Sebagai bagian dari kajian filsafat komunikasi, penting untuk memahami bahwa algoritma tidak hanya sekadar alat teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan moral. Berdasarkan pandangan konstruktivisme sosial, teknologi tidak berkembang secara netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik tempat ia dikembangkan (MacKenzie & Wajcman, 1999). Dengan demikian, pertanyaan tentang etika algoritma tidak dapat dipisahkan dari analisis kritis terhadap struktur kekuasaan yang ada dalam industri teknologi dan bagaimana keputusan desain algoritma dapat memperkuat atau melemahkan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial.

Dalam konteks ini, filsafat komunikasi menawarkan kerangka berpikir yang memungkinkan kita untuk mengkritisi bagaimana algoritma beroperasi dalam ruang publik digital. Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas (1989) dapat digunakan untuk menilai apakah algoritma membantu atau justru menghambat proses deliberasi demokratis. Jika algoritma justru mempersempit akses informasi dan memperkuat polarisasi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi berbagai pandangan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis algoritma sebagai subjek etis dalam konteks filsafat komunikasi, dengan menyoroti berbagai aspek moral dalam desain dan implementasi algoritma di media digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih etis dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, sehingga algoritma dapat digunakan untuk mendukung komunikasi yang lebih adil dan demokratis. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, pengembang teknologi, dan masyarakat luas mengenai pentingnya memahami dampak algoritma terhadap komunikasi digital.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai etika algoritma masih berkembang dan terus menjadi topik yang relevan di era digital ini. Dengan meningkatnya ketergantungan manusia pada teknologi berbasis algoritma, semakin penting pula bagi kita untuk memahami dan mengkaji implikasi moral yang menyertainya. Pendekatan filsafat komunikasi dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih kritis terhadap peran algoritma dalam kehidupan sosial, serta memberikan landasan bagi upaya menciptakan teknologi yang lebih bertanggung jawab dan etis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) untuk mengkaji peran algoritma dalam komunikasi digital dari perspektif filsafat komunikasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana algoritma mempengaruhi dinamika sosial dan membentuk struktur komunikasi di dunia digital. Berikut adalah tahapan metode penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan

Penelitian ini bersifat eksploratif dan analitis dengan fokus pada kajian filsafat komunikasi mengenai dimensi etis algoritma dalam media digital. Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi teori ruang publik Jürgen Habermas (1991), teori hegemoni Antonio Gramsci (1971), serta pendekatan etika teknologi Emmanuel Levinas (1998). Melalui perspektif ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana algoritma berperan dalam membentuk opini publik dan dampak etisnya terhadap komunikasi digital.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Sumber Primer:** Artikel ilmiah, laporan penelitian, dan buku akademik yang membahas peran algoritma dalam komunikasi digital.
- **Sumber Sekunder:** Analisis dari studi kasus mengenai algoritma media sosial dan dampaknya terhadap polarisasi sosial, disinformasi, serta fragmentasi informasi dalam komunikasi digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

- **Kajian Literatur:** Mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur akademik mengenai algoritma, filsafat komunikasi, dan etika media digital.
- **Analisis Wacana Kritis (CDA):** Menganalisis bagaimana algoritma membentuk narasi dan struktur komunikasi dalam media digital, dengan menelaah studi kasus terkait polarisasi sosial, disinformasi, dan keberpihakan algoritma dalam platform media sosial.

4. Teknik Analisis Data

- **Identifikasi Tema:** Mengidentifikasi pola dan tema utama dalam literatur dan studi kasus yang berkaitan dengan dampak etis algoritma.
- **Eksplorasi Hubungan Kausal:** Menganalisis bagaimana algoritma mempengaruhi distribusi informasi dan membentuk opini publik berdasarkan teori filsafat komunikasi.
- **Interpretasi Normatif:** Menafsirkan implikasi etis dari algoritma dalam komunikasi digital berdasarkan teori etika dan filsafat komunikasi.

5. Batasan Penelitian

- Studi ini lebih berfokus pada aspek teoretis dan konseptual daripada penelitian empiris berbasis data eksperimen.
- Kajian ini menitikberatkan pada media sosial sebagai studi kasus utama, sehingga generalisasi ke ranah digital lain seperti e-commerce atau sistem rekomendasi berita mungkin terbatas.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam memahami peran algoritma sebagai subjek etis serta menawarkan solusi etis dalam desain dan implementasi algoritma dalam komunikasi digital.

Pembahasan

1. Algoritma sebagai Subjek Etis dalam Filsafat Komunikasi

Dalam perkembangan filsafat komunikasi kontemporer, algoritma telah berevolusi dari sekadar instrumen teknis menjadi entitas yang memiliki peran signifikan dalam membentuk struktur sosial dan dinamika interaksi manusia. Algoritma bukan lagi hanya serangkaian kode yang menjalankan perintah, melainkan agen yang turut mempengaruhi lingkungan informasi, membentuk pengalaman digital, dan secara tidak langsung mengonfigurasi realitas sosial.

Luciano Floridi dalam *The Ethics of Information* (2013) memperkenalkan gagasan bahwa algoritma dapat dipahami sebagai "agen moral parsial." Meskipun algoritma tidak memiliki kesadaran atau niat, keputusan yang dihasilkan oleh sistem ini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Dalam konteks ini, algoritma menjadi bagian dari jaringan tanggung jawab moral yang melibatkan pengembang, pengguna, dan institusi yang mengelolanya. Algoritma tidak hanya memproses data, tetapi juga mengarahkan bagaimana informasi disajikan, mempengaruhi preferensi, dan bahkan menentukan akses terhadap peluang sosial-ekonomi.

Satu konsep yang disebut "fakta institusional" yang dikemukakan John Searle (1995) menyebutkan, struktur sosial tercipta melalui aturan yang disepakati secara kolektif. Dalam era digital, algoritma menjadi bagian dari fakta institusional ini, di mana mereka mengatur logika platform media sosial, e-commerce, hingga sistem penilaian kinerja. Algoritma menciptakan norma-norma baru dalam interaksi sosial, seperti bagaimana popularitas diukur melalui *likes* atau

bagaimana opini publik dibentuk melalui kurasi konten otomatis.

Namun, algoritma media sosial sering kali justru menghambat komunikasi rasional dengan memperkuat *filter bubble*¹ dan bias konfirmasi. Bagi filosof Jurgen Habermas (1984), komunikasi rasional itu sangat penting bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis. Alih-alih mendorong dialog terbuka, algoritma cenderung mempersempit spektrum perspektif yang diakses pengguna, menciptakan ekosistem informasi yang homogen. Hal ini menimbulkan tantangan etis mengenai bagaimana algoritma dapat dirancang untuk mendukung deliberasi publik yang sehat.

Lebih parahnya, algoritma justru mereproduksi ketidakadilan sosial yang tertanam dalam data yang mereka simpan (Virginia Eubanks, 2018). Sistem kecerdasan buatan yang digunakan untuk penilaian kredit, rekrutmen kerja, atau distribusi bantuan sosial bisa memperkuat bias diskriminatif yang sudah ada di masyarakat. Tantangan etis yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa algoritma tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.

Karena itu, Frank Pasquale dalam *The Black Box Society* (2015) mengkritisi sifat tertutup dari banyak sistem algoritmik yang beroperasi seperti "kotak hitam" tanpa transparansi. Kurangnya akuntabilitas ini dapat menghasilkan keputusan yang merugikan individu tanpa mekanisme untuk meninjau atau memperbaikinya. Oleh karena itu, regulasi yang mendorong transparansi algoritmik menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam ekosistem digital.

Pendekatan Deontologis terhadap Etika Algoritma

Pendekatan deontologi Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) menegaskan bahwa setiap tindakan harus selaras dengan prinsip moral universal. Dalam konteks desain algoritma, ini berarti bahwa sistem harus dikembangkan dengan menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi otonomi individu, dan mendorong kesejahteraan bersama – bukan

semata-mata demi efisiensi atau keuntungan komersial.

Prinsip moral ini menjadi semakin relevan ketika kita mempertimbangkan bagaimana algoritma tidak hanya mengatur data, tetapi juga membentuk cara manusia memahami dunia. Algoritma memainkan peran penting dalam membangun "realitas buatan," di mana pengalaman digital kerap terasa lebih nyata dibandingkan pengalaman langsung. Fenomena ini memunculkan pertanyaan etis tentang bagaimana algoritma memengaruhi persepsi individu terhadap dunia, serta apakah hal tersebut membatasi kemampuan manusia untuk memahami realitas secara kritis.

Sejalan dengan itu, Paul Ricoeur dalam *Oneself as Another* (1992) menekankan bahwa identitas individu terbentuk melalui narasi yang mereka konsumsi dan ciptakan. Di era digital, algoritma menjadi kurator utama narasi ini, menentukan konten apa yang dilihat, dibaca, dan didengar oleh pengguna. Kurasi algoritmik yang bias dapat membentuk identitas individu secara tidak proporsional, mengancam kebebasan berpikir, dan mengurangi keberagaman kognitif dalam masyarakat.

Memahami algoritma sebagai subjek etis berarti mengakui perannya yang kompleks dalam membentuk komunikasi, identitas, dan struktur sosial. Tantangan etis yang dihadirkan algoritma menuntut pendekatan multidisipliner yang menggabungkan filsafat, teknologi, hukum, dan studi sosial. Untuk mengurangi dampak negatif algoritma, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain:

1. **Transparansi Algoritmik:** Membuka "kotak hitam" untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.
2. **Regulasi yang Ketat:** Merancang kebijakan yang melindungi hak-hak individu di ruang digital.
3. **Peningkatan Literasi Digital:** Memberdayakan pengguna agar memahami bagaimana algoritma memengaruhi pengalaman mereka.

¹ E. Pariser. 2011. *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*. Penguin Books Limited. <https://books.google.be/books?id=-FWO0puw3nYC>. Ide 'gelembung filter' berasal dari aktivis internet Eli Pariser. Menurut tesis asli Pariser, filter bubble adalah sebuah lingkungan, yang diciptakan oleh algoritma personalisasi, di mana seseorang hanya menemukan informasi atau opini. Eli

berpendapat bahwa gelembung filter ini "menutup kita terhadap ide-ide baru, subjek, dan informasi baru" yang merusak proses demokrasi dan menyebabkan peningkatan polarisasi. Istilah ini dengan cepat masuk ke dalam wacana umum dengan 'dukungan' dari tokoh-tokoh terkemuka seperti mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan mantan CEO Microsoft Bill Gates.

4. **Desain Etis:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam setiap tahap pengembangan teknologi.

Dengan demikian, refleksi kritis terhadap etika algoritma bukan hanya relevan bagi para akademisi dan pengembang teknologi, tetapi juga penting bagi setiap individu yang hidup di dalam ekosistem digital saat ini.

2. Dampak Etis Algoritma terhadap Polarisasi Sosial

Salah satu isu utama dalam komunikasi digital adalah bagaimana algoritma media sosial memperkuat polarisasi sosial. Dengan menggunakan teknik personalisasi, algoritma dirancang untuk menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, mengurangi kemungkinan mereka terpapar pandangan yang beragam. Akibatnya, tercipta efek "echo chamber" dan "filter bubble," di mana individu hanya menerima informasi yang memperkuat bias mereka sendiri. Fenomena ini tidak hanya membatasi wawasan, tetapi juga mendorong fragmentasi sosial yang membuat dialog lintas kelompok menjadi semakin sulit.

Kondisi ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan bagaimana algoritma membentuk perspektif individu terhadap dunia di sekitarnya. Cass Sunstein dalam *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* (2017) menegaskan bahwa algoritma dapat mempersempit perspektif pengguna dengan menyesuaikan konten berdasarkan preferensi mereka sebelumnya. Proses ini secara tidak langsung membatasi peluang untuk berjumpa dengan ide-ide yang berbeda, menciptakan lingkungan informasi yang homogen. Dalam jangka panjang, homogenisasi ini memperkuat polarisasi dalam masyarakat karena orang semakin jarang berhadapan dengan argumen yang menantang keyakinan mereka.

Dampak lebih lanjut dari fenomena ini diuraikan oleh Eli Pariser dalam *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* (2011), yang menggambarkan bagaimana algoritma media sosial mengisolasi individu dalam gelembung informasi yang memperkuat sudut pandang tertentu. Dalam konteks politik, kondisi ini dapat memperburuk ketegangan sosial karena masing-masing kelompok hanya terpapar informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka, sehingga mengurangi potensi untuk berdialog secara kritis dan terbuka.

Implikasi terhadap ruang publik menjadi semakin jelas jika kita mengacu pada gagasan Jürgen Habermas dalam *The Structural*

Transformation of the Public Sphere (1962). Habermas menyoroti pentingnya ruang publik sebagai arena diskusi rasional dan inklusif, di mana individu dari berbagai latar belakang dapat bertukar pikiran secara setara. Namun, keberadaan algoritma yang menyaring informasi berdasarkan preferensi individu telah mengubah wajah ruang publik digital. Alih-alih menjadi tempat diskusi yang terbuka, ruang publik ini justru terfragmentasi, melemahkan diskursus demokratis yang sehat.

Dari perspektif etika komunikasi, Pierre Bourdieu dalam *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste* (1984) menunjukkan bahwa struktur sosial yang tidak seimbang dapat diperkuat oleh sistem algoritmik. Algoritma, tanpa disadari, sering kali merefleksikan bias yang ada dalam masyarakat, sehingga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan memperdalam jurang pemisah antar kelompok. Konteks ini menunjukkan bagaimana algoritma tidak hanya membentuk preferensi individu, tetapi juga menguatkan struktur kekuasaan yang ada.

Selain itu, aspek emosional dari konsumsi informasi juga menjadi perhatian penting. Zeynep Tufekci dalam *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest* (2017) menyoroti bagaimana algoritma yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan justru dapat memicu penyebaran konten yang lebih emosional dan ekstrem. Algoritma ini, dalam upayanya untuk mempertahankan perhatian pengguna, sering kali mendorong narasi yang sensasional, yang pada akhirnya mempercepat proses radikalisasi dalam masyarakat digital.

Dengan demikian, peran algoritma dalam komunikasi digital tidak bisa dianggap remeh. Algoritma tidak hanya mengatur distribusi informasi, tetapi juga membentuk cara kita memahami dunia, berinteraksi satu sama lain, dan membangun identitas sosial. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap etika algoritma menjadi krusial untuk memastikan bahwa teknologi digital berkontribusi pada dialog yang inklusif dan demokratis, bukan sebaliknya.

3. Pendekatan Etika dalam Analisis Algoritma sebagai Subjek Etis

Pendekatan etika diperlukan untuk memastikan bahwa algoritma tidak hanya berfungsi secara efektif, tetapi juga memenuhi standar moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Dua pendekatan utama yang relevan dalam analisis etika algoritma adalah deontologi dan utilitarianisme.

a. Pendekatan Deontologi

Pendekatan deontologi, sebagaimana dikembangkan oleh Immanuel Kant², menekankan bahwa tindakan harus didasarkan pada prinsip moral yang universal, bukan sekadar pada konsekuensinya. Dalam perspektif ini, tindakan yang benar atau salah tidak bergantung pada hasil akhirnya, melainkan pada apakah tindakan tersebut mematuhi norma moral yang ketat dan bersifat universal.

Dalam konteks algoritma, deontologi mengimplikasikan bahwa perancang sistem AI harus memastikan bahwa algoritma yang mereka kembangkan mematuhi prinsip-prinsip etika yang ketat, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran, tanpa memprioritaskan kepentingan ekonomi atau keuntungan perusahaan teknologi. Sebagai contoh, algoritma yang digunakan dalam platform media sosial harus dirancang untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memanipulasi emosi pengguna, meskipun hal ini mungkin meningkatkan keterlibatan pengguna dan keuntungan iklan.

Namun, dalam praktiknya, banyak algoritma yang justru berperan dalam memperkuat polarisasi sosial dan distorsi kebenaran. Misalnya, algoritma yang menyajikan konten berdasarkan preferensi pengguna dapat secara tidak langsung menciptakan filter bubble, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip komunikasi yang jujur dan adil karena mencegah pengguna mendapatkan informasi yang beragam dan objektif.

Dari perspektif deontologis, sistem semacam ini dapat dianggap tidak etis, terlepas dari apakah hal tersebut meningkatkan kepuasan pengguna atau keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan etika deontologi dalam pengembangan algoritma menuntut adanya akuntabilitas moral bagi para pengembang dan perusahaan teknologi untuk menjamin bahwa teknologi yang mereka ciptakan tidak melanggar prinsip-prinsip etika yang mendasar.

b. Pendekatan Utilitarianisme

Pendekatan utilitarianisme, sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham³ dan John Stuart Mill⁴, menilai moralitas berdasarkan hasil atau dampak yang dihasilkan. Dalam pandangan

ini, tindakan dianggap etis jika mampu memaksimalkan manfaat dan mengurangi kerugian bagi sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, etika utilitarianisme dalam konteks algoritma menekankan bahwa sistem AI harus dirancang untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai contoh, algoritma yang digunakan dalam layanan pencarian informasi dapat dianggap etis jika mampu meningkatkan akses publik terhadap informasi yang benar dan bermanfaat, membantu pendidikan, serta mendukung keberagaman pandangan. Dalam konteks ini, AI dapat berfungsi sebagai alat yang membantu manusia dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang luas dan komprehensif.

Namun, dalam praktiknya, banyak algoritma yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan manfaat sosial. Sebagai contoh, algoritma rekomendasi di media sosial sering kali dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, tetapi dengan cara yang dapat memicu emosi negatif, seperti kemarahan atau ketakutan, karena jenis konten tersebut terbukti lebih menarik perhatian. Akibatnya, meskipun sistem ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, dampaknya bagi masyarakat bisa bersifat merugikan, seperti peningkatan polarisasi politik, penyebaran disinformasi, dan penguatan stereotip sosial.

Dari perspektif utilitarianisme, jika dampak negatif ini lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka sistem tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak etis. Oleh karena itu, agar selaras dengan prinsip utilitarian, algoritma harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan dan regulasi algoritma, serta tanggung jawab etis dari perusahaan teknologi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari sistem yang mereka kembangkan.

Baik pendekatan deontologi maupun utilitarianisme memberikan perspektif yang berharga dalam menganalisis etika algoritma. Pendekatan deontologi menekankan prinsip moral yang ketat, sementara utilitarianisme menekankan konsekuensi dari penggunaan algoritma. Dalam dunia yang semakin

² Kant, Immanuel. *Dasar-Dasar Metafisika Moral*. Diterjemahkan oleh Robby Habiba Abror. Disunting oleh Cuk Ananta Wijaya. Sleman, DIY: Insight Reference, 2022. Diterjemahkan dari *Foundations of the Metaphysics of Morals* oleh Immanuel Kant, diterjemahkan oleh Lewis White Beck (Macmillan: Library of Liberal Arts, 1990), dari edisi Jerman

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) & *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?* (1784).

³ Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son, 1789

⁴ Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn, 1863.

didominasi oleh teknologi digital, penerapan kedua pendekatan ini dapat membantu menciptakan sistem AI yang lebih bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembang algoritma dan perusahaan teknologi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika ini dalam setiap tahap desain dan implementasi sistem mereka.

4. Dampak Jangka Panjang Polarisasi Sosial akibat Algoritma

Polarisasi sosial yang diperburuk oleh algoritma tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang yang dapat mengubah struktur sosial dan politik suatu masyarakat. Ketika algoritma terus-menerus mengarahkan individu ke dalam ruang gema yang memperkuat pandangan mereka sendiri, kepercayaan terhadap mereka yang memiliki sudut pandang berbeda perlahan terkikis. Masyarakat yang sebelumnya terbuka terhadap diskusi dan perbedaan pendapat mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai, menciptakan jurang sosial yang semakin sulit dijembatani.

Ketidakpercayaan ini tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga meluas ke institusi yang seharusnya menjadi pilar demokrasi. Ketika informasi yang dikonsumsi melalui algoritma lebih banyak menegaskan keyakinan pribadi dibandingkan menyajikan perspektif yang seimbang, masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap proses politik yang membutuhkan kerja sama dan kompromi. Polarisasi yang tajam membuat upaya membangun konsensus menjadi semakin sulit, karena setiap pihak merasa bahwa posisi mereka adalah satu-satunya kebenaran yang sah. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan fungsi demokrasi yang sehat dan menciptakan kondisi di mana perbedaan pendapat bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang konstruktif, melainkan sebagai ancaman yang harus ditentang.

Selain itu, radikalisme menjadi risiko nyata dalam ekosistem digital yang didorong oleh algoritma. Ketika individu hanya terpapar pada narasi yang semakin memperkuat pandangan mereka tanpa adanya tantangan intelektual yang sehat, mereka lebih mudah terserap ke dalam komunitas yang berpikir seragam. Dalam komunitas semacam itu, ide-ide ekstrem dapat berkembang tanpa ada mekanisme penyeimbang. Akibatnya, individu yang sebelumnya moderat dapat bergeser ke posisi yang lebih radikal, baik dalam konteks politik, agama, maupun ideologi lainnya. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan dapat mengarah

pada tindakan yang lebih ekstrem, termasuk kekerasan berbasis ideologi yang didorong oleh keyakinan bahwa pandangan mereka harus ditegakkan dengan cara apa pun.

Fragmentasi sosial yang semakin dalam menjadi konsekuensi berikutnya dari polarisasi yang didorong oleh algoritma. Dengan semakin kuatnya batas-batas sosial yang terbentuk di ruang digital, kelompok-kelompok masyarakat menjadi semakin terisolasi satu sama lain, baik secara pemikiran maupun interaksi sosial. Dalam kondisi seperti ini, dialog lintas kelompok menjadi semakin jarang, dan masyarakat kehilangan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Dampak dari fenomena ini bukan hanya menciptakan ketegangan sosial yang meningkat, tetapi juga memperburuk ketidakmampuan suatu masyarakat untuk menemukan titik temu dalam menghadapi tantangan kolektif.

Pada akhirnya, ketidakstabilan sosial menjadi risiko paling besar yang muncul dari polarisasi yang berkepanjangan. Ketika masyarakat terpecah belah dan kepercayaan terhadap institusi melemah, potensi terjadinya konflik sosial meningkat. Dalam kondisi tertentu, ketegangan ini dapat meledak menjadi aksi kekerasan yang lebih luas, terutama jika kelompok-kelompok yang saling berlawanan merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki cara lain untuk memperjuangkan kepentingan mereka selain melalui konfrontasi langsung. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan lingkungan sosial dan politik yang semakin tidak stabil, di mana kebijakan publik pun sulit untuk diterapkan secara efektif karena kurangnya kesepakatan di antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi.

Dengan memahami dampak jangka panjang ini, menjadi semakin jelas bahwa algoritma bukan sekadar alat netral yang hanya berfungsi untuk menyajikan informasi, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk meninjau ulang bagaimana algoritma dirancang dan bagaimana penggunaannya dapat diarahkan agar tidak memperparah perpecahan sosial yang sudah ada.

5. Perbandingan dengan Era Sebelum Dominasi Algoritma dalam Komunikasi Digital

Era sebelum dominasi algoritma dalam komunikasi digital menampilkan lanskap media yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan saat ini. Pada periode tersebut, masyarakat mengandalkan media tradisional

seperti surat kabar, televisi, dan radio sebagai sumber utama informasi. Meskipun media ini tidak sepenuhnya bebas dari bias, mereka beroperasi dalam sistem yang memiliki kontrol editorial ketat dan kode etik jurnalistik yang bertujuan menjaga akurasi serta keseimbangan dalam penyajian berita (McChesney, 2013).

Salah satu karakteristik utama era tersebut adalah adanya kontrol editorial yang kuat. Jurnalis dan editor memiliki peran penting dalam menyaring, mengonfirmasi, dan menyajikan informasi kepada publik. Proses ini memungkinkan adanya mekanisme pengawasan yang dapat membatasi penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Selain itu, media tradisional beroperasi berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial, di mana mereka diwajibkan untuk memberikan berita yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan sistem algoritmik saat ini, di mana konten dikurasi secara otomatis berdasarkan preferensi pengguna, tanpa ada intervensi manusia yang secara aktif mengevaluasi dampaknya terhadap wacana publik.

Komunikasi di era sebelum algoritma juga lebih terbuka terhadap berbagai perspektif. Meskipun setiap media memiliki kecenderungan politik atau ideologi tertentu, mereka tetap terikat oleh standar jurnalistik yang mengharuskan mereka untuk menghadirkan sudut pandang yang beragam. Keberagaman perspektif ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang lebih luas dan membentuk opini berdasarkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Berbeda dengan era digital yang didominasi algoritma, di mana konten disesuaikan dengan preferensi pengguna, menyebabkan masyarakat lebih cenderung menerima informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri dan mengurangi paparan terhadap sudut pandang yang berbeda.

Selain itu, paparan informasi di masa sebelum dominasi algoritma cenderung lebih beragam. Dalam lingkungan media tradisional, masyarakat memperoleh berita dari sumber yang lebih luas dan umum. Hal ini memberikan peluang bagi audiens untuk menemukan perspektif yang berbeda dan menantang keyakinan mereka sendiri. Sebaliknya, algoritma dalam platform digital saat ini secara aktif menyesuaikan konten yang dikonsumsi pengguna berdasarkan pola perilaku dan preferensi mereka. Akibatnya, banyak individu yang hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, menciptakan fenomena "filter bubble" yang mempersempit wawasan dan memperkuat bias kognitif.

Dengan beragamnya informasi yang tersedia di media tradisional, dampak polarisasi sosial juga lebih rendah dibandingkan era digital saat ini. Karena tidak ada sistem otomatis yang secara eksplisit menyesuaikan konten berdasarkan minat pengguna, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk berinteraksi dengan berbagai perspektif. Hal ini membantu membangun pemahaman lintas kelompok dan mengurangi potensi perpecahan sosial yang tajam. Di sisi lain, algoritma dalam media digital justru memperparah polarisasi dengan menyajikan konten yang semakin memperkuat kepercayaan yang sudah ada, sehingga menghambat dialog antar kelompok yang berbeda pandangan.

Namun, dengan munculnya algoritma digital, mekanisme pengawasan dan keseimbangan informasi semakin berkurang. Dalam ekosistem media sosial dan platform digital, distribusi berita tidak lagi dikendalikan oleh editor atau jurnalis, melainkan oleh sistem otomatis yang mengoptimalkan keterlibatan pengguna sebagai prioritas utama. Hal ini menyebabkan informasi menjadi lebih terfragmentasi, karena setiap individu menerima berita yang dikurasi sesuai dengan minat mereka, tanpa adanya upaya untuk memastikan keberagaman perspektif.

Tantangan utama dalam era algoritma adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kebutuhan akan keberagaman informasi yang sehat bagi demokrasi. Jika media tradisional di masa lalu masih memiliki mekanisme pengawasan yang membantu menjaga akurasi dan keseimbangan, maka dalam konteks digital, diperlukan kebijakan yang lebih ketat serta kesadaran kolektif untuk mengurangi dampak negatif algoritma terhadap komunikasi publik dan kehidupan sosial.

Kesimpulan

Dalam era digital, algoritma tidak lagi hanya dilihat sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Artikel ini menyoroti bagaimana algoritma berperan dalam membentuk opini publik, mendorong polarisasi sosial, serta membawa implikasi moral yang perlu dikaji lebih lanjut.

Algoritma, terutama di media sosial, berfungsi menyaring dan menyajikan informasi yang dianggap relevan bagi pengguna berdasarkan preferensi mereka. Namun, personalisasi ini sering kali menciptakan fenomena "filter bubble" dan "echo chamber," di mana pengguna hanya

terpapar pada pandangan yang serupa dengan mereka. Hal ini mengurangi keberagaman perspektif dan memperkuat polarisasi sosial. Selain itu, algoritma cenderung mempromosikan konten sensasional dan emosional demi meningkatkan keterlibatan pengguna, yang pada akhirnya dapat menyebarkan disinformasi lebih cepat dibandingkan fakta. Fenomena ini menunjukkan bahwa algoritma tidak netral; keputusan desainnya mencerminkan bias manusia yang menciptakannya.

Persoalan bias dalam algoritma menjadi perhatian utama dalam artikel ini. Bias dapat muncul dari data yang digunakan untuk melatih algoritma atau dari nilai-nilai yang tertanam dalam desainnya. Misalnya, algoritma pengenalan wajah sering kali lebih akurat untuk individu berkulit terang dibandingkan dengan mereka yang berkulit gelap. Dalam konteks komunikasi digital, bias semacam ini dapat memengaruhi akses informasi dan peluang sosial bagi kelompok tertentu. Selain itu, penggunaan *big data* oleh algoritma menimbulkan kekhawatiran terkait privasi individu. Kasus Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data pribadi dapat dimanfaatkan tanpa transparansi untuk memengaruhi opini politik, menimbulkan pertanyaan etis tentang regulasi dan akuntabilitas.

Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan etis dalam desain dan implementasi algoritma. Dengan menggunakan teori ruang publik Jürgen Habermas, artikel ini menilai apakah algoritma mendukung atau menghambat deliberasi demokratis. Algoritma yang mempersempit akses informasi bertentangan dengan prinsip ruang publik yang inklusif. Selain itu, pendekatan deontologis Immanuel Kant menegaskan bahwa desain algoritma harus menghormati hak asasi manusia dan mendorong kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, artikel ini mengajak pembaca untuk memahami algoritma sebagai subjek etis yang memiliki tanggung jawab moral terhadap dampaknya pada masyarakat. Dengan pendekatan filsafat komunikasi, artikel ini menawarkan kerangka berpikir untuk mengkritisi peran algoritma dalam ruang publik digital sekaligus memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pengembang teknologi agar menciptakan sistem kecerdasan buatan yang lebih adil dan bertanggung jawab secara etis.

Daftar Pustaka:

Buku

- Floridi, Luciano. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.
- Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Habermas, Jürgen. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Habermas, Jürgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Isaak, Julie, & Hanna, Emily. (2018). "User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection." *Computer and Telecommunications Law Review*.
- MacKenzie, Donald, & Wajcman, Judy. (1999). *The Social Shaping of Technology*. Open University Press.
- Pasquale, Frank. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Ricoeur, Paul. (1992). *Oneself as Another*. University of Chicago Press.
- Searle, John R. (1995). *The Construction of Social Reality*. Free Press.
- Kant, Immanuel. *Dasar-Dasar Metafisika Moral*. Diterjemahkan oleh Robby Habiba Abror. Disunting oleh Cuk Ananta Wijaya. Sleman, DIY: Insight Reference, 2022.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son, 1789.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn, 1863.

Artikel Jurnal

- Buolamwini, Joy, & Gebru, Timnit. (2018). "Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification." *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*.
- Pariser, Eli. (2011). "The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You." *Penguin Press*.
- Vosoughi, Soroush, Roy, Deb Roy, & Aral, Sinan. (2018). "The spread of true and false news online." *Science*, 359(6380), 1146-1151.

Laporan Penelitian

Eubanks, Virginia. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press.

Sumber Daring

Cambridge Analytica Scandal Overview - Tersedia di Wikipedia.